

Kajian Literatur tentang Implementasi Akuntansi Berbasis Kinerja dalam Mewujudkan Good Financial Governance pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tommy Indra Gunawan^{1*}, Dewi Noor Susanti²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana, Indonesia
Universitas Putra Bangsa, Indonesia

Corresponding Author: tommy.indra.0572@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRACT

The reform of regional public financial management has become an important issue in line with increasing demands for transparency, accountability, and performance in local governments. One strategic instrument considered capable of supporting sound financial governance is the implementation of performance-based accounting. This study aims to review and synthesize reputable literature on the implementation of performance-based accounting and its relationship with good financial governance in local governments, with a particular focus on the Government of West Java Province. This study employs a qualitative approach using a literature review method (narrative literature review). Data were obtained from reputable international journals, academic books, and reports published by international institutions relevant to public sector accounting and financial governance. The analysis was conducted through thematic analysis to identify key themes, patterns of relationships, and factors influencing the linkage between performance-based accounting and good financial governance. The findings indicate that performance-based accounting plays an important role in directing regional financial management toward the achievement of measurable outputs and outcomes, strengthening performance accountability, and improving the quality of financial information. Furthermore, the literature reveals a positive relationship between the implementation of performance-based accounting and the strengthening of good financial governance principles, particularly transparency and accountability. However, the effectiveness of performance-based accounting largely depends on supporting factors such as human resource capacity, leadership commitment, and the readiness of organizational systems and culture within local governments. The conclusion of this study emphasizes that performance-based accounting is a crucial instrument in achieving good financial governance in local governments; however, its successful implementation requires adequate institutional support. This literature review is expected to contribute theoretically to the development of public sector accounting literature and practically to serve as a reference for local governments in strengthening financial governance.

Keywords: performance-based accounting, good financial governance, local government, literature review.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perbaikan tata kelola keuangan publik merupakan tuntutan yang semakin mendesak di era otonomi daerah, seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menyerap anggaran secara optimal, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut menghasilkan output dan outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, sistem akuntansi sektor publik memegang peranan strategis karena berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, pengendalian, dan penyedia informasi bagi pengambilan keputusan publik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa reformasi akuntansi sektor publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas fiskal, yang merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good financial governance (Hood, 1995; Christiaens et al., 2015; Lapsley et al., 2009).

Akuntansi berbasis kinerja (performance-based accounting) merupakan salah satu bentuk reformasi akuntansi sektor publik yang menekankan keterkaitan antara pengelolaan anggaran dan capaian kinerja. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga

pada pengukuran efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik melalui indikator kinerja yang terukur. Literatur internasional menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis kinerja dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memperkuat mekanisme akuntabilitas pemerintah, sehingga mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik (Pollitt & Bouckaert, 2017; Van Helden & Reichard, 2019). Oleh karena itu, implementasi akuntansi berbasis kinerja menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam dalam upaya memperkuat good financial governance pada pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai konteks kajian karena merupakan salah satu pemerintah daerah dengan skala terbesar dan tingkat kompleksitas pengelolaan keuangan yang tinggi di Indonesia. Besarnya anggaran daerah, luasnya cakupan program pembangunan, serta kompleksitas struktur organisasi menjadikan Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menerapkan sistem akuntansi yang berorientasi pada kinerja. Dibandingkan dengan pemerintah daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal lebih kecil, Provinsi Jawa Barat menyediakan konteks yang lebih kaya untuk memahami dinamika implementasi akuntansi berbasis kinerja dan implikasinya terhadap tata kelola keuangan daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompleksitas organisasi dan kapasitas institusional pemerintah daerah berpengaruh terhadap efektivitas implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan publik (Sofyani & Akbar, 2015; Andrews et al., 2021).

Dalam kajian ini, akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance diposisikan sebagai dua konsep yang saling berkaitan. Akuntansi berbasis kinerja berperan sebagai instrumen teknis dan manajerial yang menyediakan informasi mengenai penggunaan anggaran dan capaian kinerja, sedangkan good financial governance merefleksikan kualitas tata kelola keuangan yang ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Sejumlah studi menegaskan bahwa kualitas sistem akuntansi publik yang baik berkontribusi langsung terhadap penguatan prinsip-prinsip tata kelola keuangan melalui peningkatan keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik (Broadbent & Guthrie, 2008; Grossi et al., 2016).

Meskipun demikian, kajian-kajian terdahulu umumnya masih membahas akuntansi sektor publik, penganggaran berbasis kinerja, dan good governance secara terpisah atau dalam konteks yang luas dan umum. Beberapa penelitian internasional menyoroti hubungan antara reformasi akuntansi dan tata kelola keuangan, namun belum secara spesifik mengkaji implementasi akuntansi berbasis kinerja pada konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian nasional juga cenderung bersifat empiris dan terbatas pada unit pemerintah daerah tertentu tanpa melakukan sintesis literatur secara komprehensif. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa belum tersedianya kajian literatur yang secara sistematis mengintegrasikan temuan-temuan penelitian bereputasi terkait akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance, khususnya dalam konteks Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Sofyani et al., 2020; Pudjono et al., 2024).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kajian literatur ini memiliki kebaruan pada upaya penyusunan sintesis konseptual yang mengintegrasikan hasil penelitian nasional dan internasional mengenai implementasi akuntansi berbasis kinerja dan keterkaitannya dengan good financial governance pada pemerintah daerah tingkat provinsi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pengayaan literatur akuntansi sektor publik serta manfaat praktis sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis literatur bereputasi yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran akuntansi berbasis kinerja dalam mewujudkan good financial governance pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Berbasis Kinerja

Akuntansi berbasis kinerja (performance-based accounting) merupakan bagian dari reformasi akuntansi sektor publik yang menekankan keterkaitan antara pengelolaan keuangan dan capaian kinerja organisasi pemerintah. Pendekatan ini berkembang seiring dengan munculnya paradigma *New Public Management* yang menuntut pemerintah untuk mengelola sumber daya publik secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel (Hood, 1995; Pollitt & Bouckaert, 2017). Dalam konteks ini, akuntansi tidak

hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen manajerial untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan output dan outcome.

Akuntansi berbasis kinerja mengintegrasikan informasi keuangan dengan indikator kinerja sehingga memungkinkan evaluasi atas sejauh mana anggaran publik digunakan untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah (Van Helden & Reichard, 2019). Sistem ini menekankan pentingnya pengukuran hasil, bukan hanya kepatuhan terhadap prosedur atau realisasi anggaran. Oleh karena itu, akuntansi berbasis kinerja dipandang mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat akuntabilitas publik melalui penyediaan informasi yang lebih relevan dan berorientasi hasil (Lapsley et al., 2009).

Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan akuntansi berbasis kinerja menjadi semakin penting karena daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem akuntansi dan pengukuran kinerja yang baik berkorelasi positif dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Sofyani & Akbar, 2015; Sofyani et al., 2020). Dengan demikian, akuntansi berbasis kinerja merupakan elemen kunci dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Good Financial Governance

Good financial governance merupakan bagian integral dari konsep *good governance* yang berfokus pada tata kelola keuangan publik. Konsep ini menekankan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah (World Bank, 2018). Tata kelola keuangan yang baik menjadi prasyarat utama bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Literatur akuntansi sektor publik menunjukkan bahwa kualitas tata kelola keuangan sangat dipengaruhi oleh sistem pelaporan dan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah (Broadbent & Guthrie, 2008; Grossi et al., 2016). Sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk menilai kinerja pemerintah secara objektif. Dengan demikian, good financial governance tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem keuangan publik.

Dalam konteks pemerintah daerah, good financial governance menjadi semakin krusial karena tingginya risiko penyalahgunaan anggaran dan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik cenderung memiliki tingkat akuntabilitas dan kinerja yang lebih tinggi (Christiaens et al., 2015; Andrews et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi agenda penting dalam reformasi sektor publik.

Hubungan Akuntansi Berbasis Kinerja dan Good Financial Governance

Hubungan antara akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance dapat dipahami melalui peran akuntansi sebagai mekanisme pengendalian dan pertanggungjawaban publik. Akuntansi berbasis kinerja menyediakan informasi yang tidak hanya menunjukkan bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi juga apa hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran tersebut. Informasi ini menjadi dasar penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah dan kualitas tata kelola keuangan (Van Helden & Reichard, 2019).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal (Pollitt & Bouckaert, 2017; Pudjono et al., 2024). Dengan adanya informasi kinerja yang jelas dan terukur, pemangku kepentingan dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip good financial governance yang menekankan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik.

Namun demikian, efektivitas hubungan antara akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance sangat bergantung pada kapasitas institusional pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, serta komitmen pimpinan organisasi. Studi empiris menunjukkan bahwa tanpa dukungan organisasi dan budaya akuntabilitas yang kuat, penerapan akuntansi berbasis kinerja tidak selalu

menghasilkan perbaikan tata kelola keuangan secara signifikan (Sofyani et al., 2020; Andrews et al., 2021). Oleh karena itu, hubungan kedua variabel ini perlu dipahami secara komprehensif melalui kajian literatur yang sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menelaah, dan mensintesis konsep serta temuan empiris yang berkaitan dengan implementasi akuntansi berbasis kinerja dan keterkaitannya dengan good financial governance pada pemerintah daerah. Kajian literatur memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan teori, hasil penelitian terdahulu, serta pola hubungan antarvariabel berdasarkan publikasi ilmiah yang relevan (Creswell & Poth, 2018).

Model kajian literatur yang digunakan adalah narrative literature review, yang menekankan pada sintesis konseptual dan analitis terhadap literatur bereputasi. Model ini sesuai digunakan ketika tujuan penelitian adalah membangun pemahaman teoretis dan kerangka konseptual, bukan melakukan pengujian hipotesis secara statistik (Snyder, 2019). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan penelitian untuk menjelaskan peran akuntansi berbasis kinerja dalam mewujudkan good financial governance di lingkungan pemerintah daerah.

Sumber dan Strategi Penelusuran Literatur

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah, meliputi artikel jurnal internasional bereputasi, buku akademik, serta laporan institusi internasional yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah yang kredibel seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, yang dikenal luas sebagai sumber utama publikasi ilmiah bereputasi dalam bidang ilmu sosial dan akuntansi sektor publik (Kitchenham et al., 2009).

Kata kunci yang digunakan dalam proses penelusuran literatur antara lain *performance-based accounting*, *public sector accounting*, *performance measurement*, *good financial governance*, *public financial management*, dan *local government*. Untuk menjaga relevansi dan kebaruan kajian, peneliti memprioritaskan artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, namun tetap mempertimbangkan literatur klasik yang menjadi landasan teoretis utama dalam kajian akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Untuk memastikan kualitas dan relevansi kajian, peneliti menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi dalam pemilihan literatur. Kriteria inklusi meliputi: (1) literatur yang membahas akuntansi berbasis kinerja, akuntansi sektor publik, dan tata kelola keuangan; (2) publikasi yang berasal dari jurnal internasional bereputasi, buku akademik, atau laporan institusi yang diakui; serta (3) penelitian yang relevan dengan konteks sektor publik dan/atau pemerintahan daerah.

Sebaliknya, kriteria eksklusi mencakup literatur yang bersifat non-ilmiah, artikel opini tanpa metodologi yang jelas, publikasi populer yang tidak melalui proses penelaahan sejawat (*peer review*), serta penelitian yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan variabel penelitian. Penerapan kriteria ini bertujuan untuk meningkatkan validitas akademik dan memastikan bahwa literatur yang dianalisis memiliki kontribusi ilmiah yang signifikan (Tranfield et al., 2003).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam kajian literatur ini dilakukan melalui analisis tematik (thematic analysis). Tahap awal analisis dimulai dengan pengelompokan literatur berdasarkan fokus pembahasan utama, yaitu akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi konsep kunci, temuan utama, serta pola hubungan antarvariabel yang muncul dari berbagai penelitian terdahulu.

Hasil analisis kemudian disintesis secara naratif untuk membangun pemahaman yang sistematis mengenai bagaimana implementasi akuntansi berbasis kinerja berkontribusi terhadap

penguatan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah. Proses sintesis ini tidak hanya menyoroti kesamaan temuan antarpenelitian, tetapi juga mengidentifikasi perbedaan hasil, variasi konteks, serta celah penelitian yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut (Braun & Clarke, 2006).

Validitas dan Keandalan Kajian

Untuk menjaga validitas dan keandalan hasil kajian, peneliti menerapkan beberapa strategi, antara lain penggunaan sumber literatur yang kredibel dan bereputasi, perbandingan temuan dari berbagai penelitian, serta penelusuran literatur yang dilakukan secara sistematis dan transparan. Selain itu, sintesis dilakukan dengan mengacu pada berbagai perspektif teoretis guna meminimalkan bias interpretasi. Penggunaan jurnal internasional bereputasi dan buku akademik utama diharapkan dapat meningkatkan keandalan kesimpulan yang dihasilkan dari kajian literatur ini (Snyder, 2019).

Model Sitasi yang Digunakan

Seluruh penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam penelitian ini menggunakan APA Style (7th Edition). Model sitasi ini dipilih karena merupakan standar internasional yang umum digunakan dalam penelitian ilmu sosial, akuntansi, dan administrasi publik, serta mendukung konsistensi, kejelasan, dan akuntabilitas dalam penulisan karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses penelusuran, seleksi, dan penyaringan literatur sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan pada metode kajian literatur, penelitian ini menganalisis sejumlah literatur bereputasi yang relevan dengan topik implementasi akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance pada pemerintah daerah. Literatur yang dianalisis terdiri atas artikel jurnal internasional bereputasi, buku akademik, serta laporan institusi internasional yang membahas reformasi akuntansi sektor publik, pengukuran kinerja, dan tata kelola keuangan publik. Proses analisis dilakukan menggunakan analisis tematik, sebagaimana dijelaskan pada metode penelitian, untuk mengidentifikasi pola, tema, dan keterkaitan utama antarvariabel yang dikaji.

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa literatur mengenai akuntansi berbasis kinerja secara konsisten mengelompok pada tiga tema utama, yaitu orientasi pada output dan outcome, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta perbaikan kualitas informasi keuangan. Tema orientasi output dan outcome menekankan bahwa akuntansi berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah mengaitkan penggunaan anggaran dengan capaian hasil yang terukur. Tema akuntabilitas kinerja menegaskan peran sistem ini dalam memperkuat pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan tema kualitas informasi keuangan menyoroti peningkatan relevansi dan keandalan informasi bagi pengambilan keputusan dan pengawasan publik.

Selain itu, hasil kajian literatur terkait good financial governance menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang baik ditandai oleh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Literatur menegaskan bahwa kualitas tata kelola keuangan sangat dipengaruhi oleh sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel cenderung menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik serta tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, hasil analisis tematik juga mengungkap adanya keterkaitan yang kuat antara akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance. Sebagian besar literatur menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis kinerja berkontribusi positif terhadap penguatan tata kelola keuangan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa efektivitas kontribusi tersebut sangat bergantung pada faktor pendukung, seperti kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, serta kesiapan sistem dan budaya organisasi pemerintah daerah. Dengan demikian, implementasi akuntansi berbasis kinerja tidak secara otomatis menjamin terwujudnya good financial governance tanpa dukungan kelembagaan yang memadai.

Ringkasan hasil kajian literatur berdasarkan analisis tematik tersebut disajikan dalam Tabel 1, yang menggambarkan tema utama, temuan kunci, serta implikasinya terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kajian Literatur tentang Akuntansi Berbasis Kinerja dan Good Financial Governance

No	Fokus Kajian	Tema Utama	Temuan Utama Literatur	Implikasi bagi Pemerintah Daerah
1	Akuntansi Berbasis Kinerja	Orientasi output dan outcome	Akuntansi berbasis kinerja mengaitkan penggunaan anggaran dengan capaian kinerja yang terukur melalui output dan outcome.	Mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
2	Akuntansi Berbasis Kinerja	Akuntabilitas kinerja	Sistem akuntansi berbasis kinerja meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas hasil program dan kegiatan.	Memperkuat akuntabilitas publik dan pengawasan stakeholder.
3	Akuntansi Berbasis Kinerja	Kualitas informasi keuangan	Akuntansi berbasis kinerja menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan dan berorientasi hasil.	Mendukung pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan.
4	Good Financial Governance	Transparansi	Tata kelola keuangan yang baik ditandai oleh keterbukaan informasi keuangan dan kinerja.	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
5	Good Financial Governance	Akuntabilitas dan kepatuhan	Akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan elemen utama good financial governance.	Mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan disiplin fiskal.
6	Keterkaitan Variabel	Kontribusi akuntansi berbasis kinerja	Akuntansi berbasis kinerja berkontribusi positif terhadap penguatan good financial governance.	Menjadi instrumen penting reformasi pengelolaan keuangan daerah.
7	Faktor Pendukung	Kapasitas dan komitmen organisasi	Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh kapasitas SDM, komitmen pimpinan, dan kesiapan sistem organisasi.	Memerlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi aparatur.

Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian literatur, akuntansi berbasis kinerja terbukti memiliki peran strategis dalam mendukung perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Tema orientasi pada output dan outcome menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengelolaan keuangan publik dari pendekatan input-oriented menuju result-oriented. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hood (1995) dan Pollitt dan Bouckaert (2017) yang menegaskan bahwa reformasi sektor publik melalui pendekatan *New Public Management* menempatkan kinerja sebagai pusat pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan demikian, akuntansi berbasis kinerja berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan antara alokasi anggaran dan capaian hasil pembangunan.

Tema peningkatan akuntabilitas kinerja yang muncul dalam hasil kajian juga konsisten dengan penelitian Sofyani dan Akbar (2015), yang menemukan bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja dalam pemerintah daerah berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas publik. Informasi kinerja yang terintegrasi dengan informasi keuangan memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan tidak hanya penggunaan anggaran, tetapi juga hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan. Kondisi ini memperkuat prinsip akuntabilitas sebagai salah satu pilar utama

dalam good financial governance, sebagaimana ditegaskan dalam literatur tata kelola keuangan publik (World Bank, 2018).

Selanjutnya, temuan terkait perbaikan kualitas informasi keuangan memperkuat hasil penelitian Lapsley et al. (2009) dan Grossi et al. (2016) yang menyatakan bahwa reformasi akuntansi sektor publik, termasuk penerapan sistem akuntansi yang berorientasi kinerja, berkontribusi pada peningkatan relevansi dan keandalan informasi keuangan pemerintah. Informasi keuangan yang berkualitas menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan strategis, pengawasan legislatif, serta penilaian kinerja oleh publik. Dalam konteks ini, akuntansi berbasis kinerja dapat dipahami sebagai elemen teknis yang mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil kajian literatur mengenai good financial governance menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang baik ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan ini sejalan dengan Christiaens et al. (2015) yang menegaskan bahwa kualitas tata kelola keuangan sangat dipengaruhi oleh sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dengan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik serta tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Andrews et al. (2021).

Lebih lanjut, keterkaitan antara akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance yang teridentifikasi dalam kajian ini memperkuat temuan Pudjono et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa sistem manajemen dan pelaporan kinerja berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintah daerah. Akuntansi berbasis kinerja menyediakan informasi yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga berkontribusi langsung terhadap penguatan good financial governance. Namun demikian, hasil kajian juga mengonfirmasi temuan Sofyani et al. (2020) yang menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sistem kinerja sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan budaya organisasi.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pembahasan ini memiliki implikasi yang signifikan. Kompleksitas organisasi dan besarnya anggaran daerah menuntut penerapan akuntansi berbasis kinerja yang konsisten dan terintegrasi. Sejalan dengan temuan Andrews et al. (2021), pemerintah daerah dengan skala besar membutuhkan dukungan kelembagaan dan kapasitas manajerial yang memadai agar reformasi akuntansi dapat memberikan dampak nyata terhadap tata kelola keuangan. Oleh karena itu, penguatan akuntansi berbasis kinerja di Provinsi Jawa Barat perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi aparatur, penguatan komitmen pimpinan, serta pengembangan budaya akuntabilitas.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa temuan kajian literatur konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance memiliki hubungan yang saling memperkuat. Akuntansi berbasis kinerja berperan sebagai instrumen teknis dan manajerial dalam menyediakan informasi yang relevan dan akuntabel, sementara good financial governance menciptakan lingkungan kelembagaan yang mendukung keberhasilan implementasi sistem tersebut. Dengan demikian, kajian literatur ini memperkuat posisi penelitian terdahulu sekaligus memberikan sintesis konseptual yang relevan bagi pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi berbasis kinerja memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya good financial governance pada pemerintah daerah. Kajian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis kinerja mampu mengarahkan pengelolaan keuangan daerah pada pencapaian output dan outcome yang terukur, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kualitas informasi keuangan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan publik. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk memahami peran dan kontribusi akuntansi berbasis kinerja terhadap tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah telah tercapai.

Selain itu, kesimpulan kajian ini menegaskan bahwa hubungan antara akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance bersifat saling memperkuat. Akuntansi berbasis kinerja menyediakan mekanisme dan informasi yang diperlukan untuk mendukung prinsip transparansi dan

akuntabilitas, sementara good financial governance menciptakan lingkungan kelembagaan yang kondusif bagi keberhasilan implementasi sistem akuntansi tersebut. Namun demikian, kajian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi berbasis kinerja sangat bergantung pada dukungan faktor kelembagaan, seperti kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, serta kesiapan sistem dan budaya organisasi pemerintah daerah.

Secara teoretis, hasil kajian ini memberikan implikasi berupa penguatan kerangka konseptual dalam akuntansi sektor publik, khususnya mengenai keterkaitan antara sistem akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance. Kajian ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa akuntansi berbasis kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, temuan kajian ini mendukung dan memperluas teori reformasi sektor publik yang menempatkan kinerja sebagai elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan.

Secara praktis, implikasi kajian ini menekankan pentingnya penerapan akuntansi berbasis kinerja secara konsisten dan terintegrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu memastikan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga mampu mendukung pengukuran kinerja dan penyediaan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur, komitmen pimpinan, dan budaya akuntabilitas menjadi faktor penting agar implementasi akuntansi berbasis kinerja dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan good financial governance.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sehingga temuan yang dihasilkan sepenuhnya bergantung pada kualitas, ruang lingkup, dan ketersediaan literatur yang dianalisis. Kedua, kajian ini tidak melakukan pengujian empiris secara langsung pada pemerintah daerah tertentu, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat konseptual dan sintesis dari penelitian terdahulu. Ketiga, meskipun fokus kajian diarahkan pada konteks Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pembahasan masih bersifat umum karena literatur yang tersedia sebagian besar membahas konteks pemerintah daerah secara luas, baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil kajian dan batasan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti di masa depan disarankan untuk melakukan penelitian empiris, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, guna menguji secara langsung hubungan antara implementasi akuntansi berbasis kinerja dan good financial governance pada pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan variabel dengan memasukkan faktor-faktor pendukung, seperti kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, budaya organisasi, dan dukungan teknologi informasi.

Penelitian di masa depan juga direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan *systematic literature review* atau *mixed methods* agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas implementasi akuntansi berbasis kinerja. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan aplikatif bagi pemerintah daerah dalam upaya memperkuat good financial governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R., Boyne, G. A., Law, J., & Walker, R. M. (2021). Strategy implementation and public service performance. *Public Administration Review*, 81(1), 53–65. <https://doi.org/10.1111/puar.13234>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Broadbent, J., & Guthrie, J. (2008). Public sector to public services: 20 years of “contextual” accounting research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(2), 129–169. <https://doi.org/10.1108/09513570810854383>

- Christiaens, J., Vanhee, C., Manes Rossi, F., Aversano, N., & Van Cauwenberge, P. (2015). The effect of IPSAS on reforming governmental financial reporting: An international comparison. *International Review of Administrative Sciences*, 81(1), 158–177. <https://doi.org/10.1177/0020852314546580>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Grossi, G., Steccolini, I., & Thomasson, A. (2016). Public sector accounting and accountability in Europe. *Public Money & Management*, 36(5), 327–334. <https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1194089>
- Hart, C. (2018). *Doing a literature review: Releasing the research imagination* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hood, C. (1995). The “new public management” in the 1980s: Variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 93–109. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0001-W](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W)
- Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study. *Information and Software Technology*, 52(8), 792–805. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.03.006>
- Lapsley, I., Mussari, R., & Paulsson, G. (2009). On the adoption of accrual accounting in the public sector: A self-evident and problematic reform. *European Accounting Review*, 18(4), 719–723. <https://doi.org/10.1080/09638180903334960>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- OECD. (2015). *Public governance and budget accountability*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264239961-en>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis – Into the age of austerity* (4th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198795179.001.0001>
- Pudjono, A. N. S., Suyono, E., & Setiawan, D. (2024). Advancing local governance: A systematic review of performance management systems. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2442545. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2442545>
- Robinson, M. (2013). *Performance-based budgeting*. IMF Technical Notes and Manuals. <https://doi.org/10.5089/9781475518983.005>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). The relationship between the use of performance measurement systems and accountability: The case of Indonesian local government. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 11(2), 187–214. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2013-0053>
- Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2020). Performance measurement, accountability, and organizational culture: An empirical study of Indonesian local government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(3), 435–456. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2019-0036>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Van Helden, G. J., & Reichard, C. (2019). Performance management in the public sector. *Public Money & Management*, 39(6), 425–433. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1585954>
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii–xxiii. <https://doi.org/10.2307/4132319>
- World Bank. (2018). *Public financial management reform: Global experience and lessons learned*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1303-7>
- World Bank. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1540-6>